



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 170 / 14 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

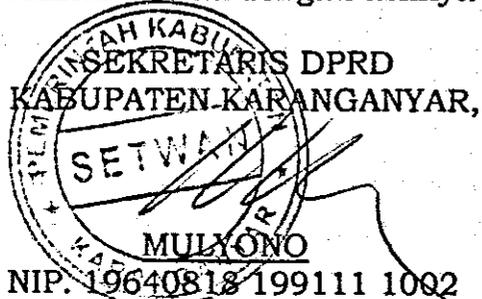
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,**

TTD

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 170/ 14 TAHUN 2020
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2021

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

| 1 | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAK-SANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAM-PAIAN |
|----|------------------------------|---|--------|------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | BARU | UBAH | | NASKAH AKADEMIK | PENJELASAN/ KETERANGAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | a. Pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; b. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Baru | | 2021 | NA | | Diskominfo | April 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|------|---|------|----|------------|--|-----------------|
| 2. | RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021- 2041 | a. Industri unggulan di daerah; b. Rencana pembangunan industri di daerah; c. Strategi dan program pembangunan industri di daerah; d. Pelaksanaan; e. Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; f. Pembiayaan. | Baru | | 2021 | NA | | 1. DPMPTSP 2. Baperlitbang 3. Disdagnakerkop dan UMKM | Oktober 2021 |
| 3. | PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH | a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi; b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada | Baru | | 2021 | | Penjelasan | 1. DPMPTSP; 2. Dinas Kesehatan; 3. BLUD RSUD; 4. DPUPR | April 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----------------------------------|---|------|---|------|----|---|-------------------------------|-----------------|
| | | Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar; c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. | | | | | | | |
| 4. | TATANAN TRANSPORTASI LOKAL | a. Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman; | Baru | | 2021 | NA | | 1. Dishub; 2. Baperlitbang | Oktober 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|
| | | <p>b. Terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, transportasi penyebrangan;</p> <p>c. Bertujuan untuk membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien;</p> <p>d. Berfungsi melayani pemindahan penumpang dan barang antar simpul atau kota lokal (SKL) dan dari simpul atau kota lokal ke provinsi atau nasional atau sebaliknya;</p> | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|------|------|------|----|------------|--|------------|
| | | e. Tataralok sebagai acuan pengembangan sistem transportasi terpadu. | | | | | | | |
| 5. | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 | Perubahan Lampiran Peraturan Daerah mengikuti perkembangan peraturan perundangan dan kondisi | | Ubah | 2021 | | Penjelasan | 1. Baperlitbang; 2. Bagian Administrasi Pembangunan Setda | April 2021 |
| 6. | PENYELENGGA-RAN ZAKAT, INFAK SHODAQOH | Kebijakan daerah mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh dari masyarakat | Baru | | 2021 | NA | | DPRD | April 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--------|--|------|---|------|----|---|------|------------|
| 7. | PANGAN | Kebijakan daerah mengatur pangan masyarakat yang meliputi : a. Perencanaan pangan b. Ketersediaan pangan c. Keterjangkauan pangan d. Konsumsi Pangan dan Gizi e. Keamanan Pangan f. Label dan iklan Pangan g. Pengawasan h. Sistem informasi Pangan i. Penelitian dan pengembangan Pangan j. Kelembagaan Pangan k. Peran serta masyarakat l. Penyidikan. | Baru | | 2021 | NA | | DPRD | April 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|------|---|------|----|---|------|------------|
| 8. | PENYELENGGA- RAAN RUMAH SEWA DAN RUMAH KOST | Kebijakan daerah dalam mengatur perijinan, pelaksanaan, dan pembangunan rumah sewa dan rumah kost di masyarakat. | Baru | | 2021 | NA | | DPRD | April 2021 |

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|---|--------|------|-------------|----------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan/ Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. |
| 1. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan c. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; | Baru | Ubah | 2021 | | Penjelasan | Badan Keuangan Daerah | Oktober 2021 |
| | | | | | 2021 | | Penjelasan | | Juni 2021 |
| | | | Baru | | 2021 | | Penjelasan | | Maret 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 2. | AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | Rancangan yang harus disesuaikan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. | | | | | | | |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya

